

WAJAH PROSEDURAL KEBIJAKAN PSBB JAKARTA TAHAP II BERBASIS *SOCIAL NETWORK ANALYSIS* (SNA)

Mohammad Thoriq Bahri¹ dan Derajad Sulisty Widhyarto²

¹Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta

²Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Abstract: Large-Scale Social Restrictions (PSBB) for the Phase II DKI Jakarta area began on September 11, 2020. The positivity rate is 14.1 percent, and the increase in cases above 1000 per day is a strong basis. Governor Regulation (Pergub) Number 88 of 2020 regarding amendments to Pergub Number 33 of 2020 concerning Implementation of the PSBB in Handling COVID-19 in DKI Jakarta mandates to focus on law enforcement. The implementation of PSBB Phase II has spurred a lot of pros and cons, especially those who were affected. This study uses a Social Network Analysis (SNA) approach, to identify responses and patterns of digital movements that occur among the people of Jakarta. Processing big-data in the form of 2129 tweets using the Rstudio application and Python programming language, it can be concluded that 54 percent of the public have a positive view, and 28 percent have a negative view regarding the policy, and 28 percent are neutral. Analysis of emotional responses, there are 70 tweets with positive views, 57 tweets that believe in the government, and 56 tweets anticipating the impact of the policy, the rest are non-significant. It is known that public opinion regarding the PSBB policy was formed by mass media accounts and personal accounts of public figures (celebrities, activists and journalists). PSBB Jakarta Phase II shows that there is risk uncertainty among the social conservative community. In addition, panoptism as an element of oversight of the arm of power to maintain the structure of society and the perceptions of the authorities against risks to the conservative society, can be seen from the prominent element of law enforcement in the implementation of the policy.

Abstrak: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah DKI Jakarta tahap II sudah dimulai pada tanggal 11 September 2020 yang lalu. Positivity rate sebesar 14,1 persen, dan peningkatan kasus diatas 1000 perhari menjadi dasar yang kuat. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta mengamanatkan untuk berfokus pada penegakan Hukum. Penerapan PSBB Tahap II ini memacu banyak sekali pro dan kontra, terutama masyarakat yang terdampak. Penelitian ini menggunakan metode analisis Social Network Analysis (SNA), guna mengidentifikasi respon dan pola gerakan digital masyarakat Jakarta. Pengolahan big-data berupa 2129 tweets menggunakan Aplikasi Rstudio dan Python programming language, dapat disimpulkan bahwa 54 persen masyarakat mendukung, dan 46 persen kurang mendukung kebijakan tersebut. Analisa tanggapan emosi, terdapat 70 tweets berpadangan positif, 57 tweets percaya terhadap pemerintah, dan 56 tweets mengantisipasi dampak kebijakan, sisanya netral. Diketahui, opini publik terkait kebijakan PSBB dibentuk oleh akun media massa, dan akun pribadi tokoh masyarakat (pejabat publik, selebriti, aktivis, dan wartawan). PSBB Jakarta Tahap II menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian pengelolaan resiko di tengah masyarakat bersifat mengikuti prosedur atau social conservative dan belum menyentuh sisi social substantive-nya. Selain itu, panoptisme sebagai unsur pengawasan merupakan kepanjangan tangan kekuasaan untuk mempertahankan struktur masyarakat dan persepsi penguasa terhadap resiko pada masyarakat yang bersifat konservatif dan prosedural pula, terlihat dari menonjolnya unsur penegakan hukum dalam penerapan kebijakan PSBB tahap II tersebut.

Kata kunci: Social Network Analysis (SNA), PSBB Jakarta Tahap II, Twitter

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 masih menjadi sebuah ancaman yang cukup serius di Indonesia. Pada awal bulan September 2020, jumlah rerata kasus telah mencapai 4000 kasus perhari, dengan *positivity rate* 14,1 persen per tanggal 14 September 2020 (Covid19.go.id). Tren jumlah infeksi semakin meningkat setiap harinya, sehingga kebijakan yang bersifat dinamis diperlukan guna

mengantisipasi perubahan kondisi dan situasi yang berjalan dengan sangat cepat.

Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya telah mengadopsi kebijakan adaptasi Kenormalan baru dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang diterapkan mulai tanggal 28 Agustus hingga 10 September 2020 melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 879 Tahun 2020. PSBB transisi berarti melakukan

pelanggaran aktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari aktivitas ekonomi, hingga layanan public dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat.

Namun, sesuai dengan evaluasi dari tim gugus tugas, teridentifikasi peningkatan jumlah kasus infleksi COVID-19 di wilayah DKI Jakarta hingga mencapai lebih dari 1000 kasus perhari terhitung mulai tanggal 3 September 2020, dimana Provinsi DKI Jakarta menyumbang jumlah kasus COVID-19 secara nasional sebesar 25,7 persen per tanggal 30 September 2020 (Covid19.go.id), serta kasus kematian yang cukup tinggi membuat Rumah Sakit rujukan dan Pemakaman khusus COVID-19 tidak dapat menampung mereka yang terinfeksi.

Peningkatan kasus yang cukup signifikan ini membuat Gubernur Provinsi Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, yang mengamanatkan stakeholder terkait untuk berfokus pada penegakan Hukum terkait dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol Kesehatan. PSBB DKI Jakarta Tahap II resmi dilaksanakan mulai tanggal 14 September 2020 hingga 2 (dua) minggu kedepan.

Penerapan PSBB Tahap II ini memancing polemik, khususnya di sosial media. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari pejabat publik, aktivis hingga masyarakat biasa melakukan partisipasi publik baik berupa dukungan maupun protes. Hal ini membuat hashtag #PSBBJakarta dan #DukungPSBB menjadi trending topic di Twitter. Dimana lebih dari 17.889 Tweets diposting hanya dalam waktu 24 jam pada tanggal 14 September 2020.

Respon masyarakat terhadap penerapan PSBB DKI Jakarta Tahap II membuktikan bahwa sosial media telah dianggap sebagai sebuah platform digital yang dapat menyampaikan aksi protesnya kepada pihak-pihak terkait. Bahkan sosial media dianggap sebuah *digital public sphere*, yang menghilangkan identitas sosial maupun politik dari partisipan, sehingga dianggap lebih efektif sebagai sarana dalam menyampaikan aspirasi publik (Sousa, H., Pinto, M., Silva, E.C., 2013).

Hal yang menarik dari penggunaan sosial media selama ini adalah, *digital public sphere* yang terjadi secara digital di sosial media cenderung berhasil mempengaruhi sebuah keputusan publik yang bersifat kolektif (Schäfer, 2017). Dampak dari penggunaan sosial media dalam mempengaruhi masyarakat dapat dikatakan sangat luas, mulai dari menyebarkan ideologi, hingga memulai Gerakan sosial dengan skala yang masif, melalui Gerakan terstruktur yang terjalin antar aktor dengan kepentingan bersama, walaupun dengan identitas dan kelas sosial yang berbeda, yang juga disebut sebagai Aktivisme Internet (Dewey, et all., 2013).

Aktivisme internet, yang menyebarkan sebuah ideologi Bersama, serta didukung oleh jurnalisme publik akan semakin meningkatkan kepedulian publik terhadap sebuah isu tertentu. Peristiwa *Arab Spring* yang bermula di Negara Tunisia, terjadi karena seorang pedagang kecil yang diperlakukan tidak layak oleh Kepolisian setempat, kemudian rekaman kejadian tersebut secara cepat tersebar di platform twitter. Jurnalisme publik tersebut mampu membuat banyak aktivis sosial, wartawan dan masyarakat umum turun kejalan guna memprotes perlakuan polisi kepada pedagang tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan perlunya revolusi di negara tersebut. Ideologi demokrasi dan kepentingan bersama yang menyebar melalui aktivisme internet, kemudian menyebar ke Mesir dan Syiria, dan berakhir dengan jatuhnya pemerintahan kedua negara tersebut, yang telah berkuasa selama 30 tahun. Aktivisme internet melalui *digital public sphere*, mampu melipatgandakan jumlah partisipan protes sosial pada peristiwa Arab Spring (Correti, L., 2013).

Peristiwa terkait dengan aktivisme internet tersebut menyiratkan sebuah fakta, yakni pentingnya memahami gejala-gejala yang timbul di dalam masyarakat, dan potensi gerakan sosial yang mungkin dapat terjadi. PSBB Jakarta yang saat ini sedang terjadi, bukan tidak mungkin akan menyebabkan munculnya Aktivisme Internet. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan sosial dan ekonomi yang bersifat kolektif. Sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Agustus 2020, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta telah mencapai

minus 8,02 persen, sehingga dirasa dapat menimbulkan ideologi kolektif terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tersebar melalui *digital public sphere* tersebut.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika yang terjadi di masyarakat selama pemberlakuan PSBB II Jakarta yang dimulai pada tanggal 14 September 2020 yang lalu. Dengan menggunakan pendekatan *Social Network Analysis (SNA)*, dan analisis sentimen melalui kategorisasi teks yang terhadap sentimen tersebut. Dimana penggunaan analisis sentiment yang digunakan dari penggunaan Natural Language Processing (NLP). Analisis tersebut akan membuat Informasi dan pola yang dihasilkan dari sebuah kebijakan menjadi sangat jelas

Analisis tersebut diharapkan dapat membaca potensi-potensi penolakan maupun pengabaian terhadap protokol Kesehatan yang terjadi di masyarakat, sekaligus memberikan pespektif baru dalam melakukan proses evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala besar Tahap II di DKI Jakarta. Temuan akan dianalisis menggunakan teori *Masyarakat Resiko (Risk Society)* yang dikemukakan oleh Ulrich Beck, dan *Panoptisme* yang dikemukakan oleh Foucault, kedua teori tersebut dianggap dapat memberikan perspektif yang semakin dalam terkait dengan determinan masyarakat yang terdampak dalam kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta Tahap II tersebut.

METODE

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana dengan metode tersebut penelitian ini bertujuan untuk membedah sebuah fenomena, dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan tren dan variasi dalam sebuah populasi masyarakat tertentu, membuat ukuran baru dari fenomena yang diamati, atau mendeskripsikan sampel dalam studi yang bertujuan untuk mengidentifikasi efek kausal sebab akibat, dan mekanisme di balik hubungan kausal dalam sebuah fenomena tertentu (Loeb, et all.).

Social Network Analysis (SNA) akan digunakan sebagai metode pengumpulan data penelitian. SNA merupakan sebuah metode

pemetaan jaringan sosial media, yang digunakan untuk melakukan identifikasi pola, struktur dan pemetaan jaringan komunikasi yang ada pada sebuah platform sosial media, hubungan antar satu unit entitas dengan unit entitas lainnya (Setatama, M.S., & Tricahyono, D., 2018), dengan menggunakan pemrograman *RStudio* dengan metode *Phyton Language Programming* akan digunakan sebagai alat untuk melakukan proses menguraikan data berbasis bigdata yang diambil dari social media platform, Twitter. Dimana langkah analisa bigdata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ((Yusainy, C., Chawa, A., F., & Kholifah, S., 2017):

Data Mining

Tahapan pertama dalam melakukan proses penguraian big data adalah melakukan proses data mining, atau menambang data. Dimana proses ini adalah proses untuk melakukan mengekstrakan data dari sumber data, dan menyusunnya dalam struktur yang berurutan dengan tujuan analisis (Jatani, A., & Ranjan, A., 2017). Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah sebanyak 10.000 sampel data tweets, yang mengandung hashtag #PSBBJakarta dari tanggal 20 hingga 29 September 2020.

Data Cleaning

Tahapan kedua adalah melakukan proses pembersihan data, yang berarti menghapus determinan yang tidak diperlukan dalam sebuah dataset, dengan tujuan sifat dan variable data siap diolah sesuai dengan kebutuhan (Liu, B., 2015). Proses pembersihan data dilakukan dengan menggunakan *Rstudio*, dengan menghapus kolom yang kosong, terduplikasi, dan konten yang tidak terbaca (hanya berupa karakter tertentu, tanpa teks). Setelah dilakukan proses pembersihan, ditemukan 2129 tweets, dengan hashtag #PSBB Jakarta. Data yang telah siap diolah kemudian disimpan dalam ekstensi .csv (excel).

Data processing

Tahapan berikutnya adalah melakukan proses pengolahan data. Hasil temuan dari penguraian data berbasis *Social Network*

Analysis (SNA) selanjutnya akan diproses menggunakan metode *Sentimen Analysis*. Dalam *Sentiment Analysis*, proses pengolahan data dilaksanakan dengan melalui proses berikut (Yusainy, C., Chawa, A.,F., & Kholifah,S., 2017): (1) Perhitungan jumlah sentiment dari tweets pada dataset yang telah disiapkan, (2) Melaksanakan pemberian label pada sentiment yang disesuaikan dengan database kata yang bersifat negatif, positif, dan netral sesuai dengan Kamus KBBI, (3) Penghapusan tweet yang diposting oleh bot/robot, (4) Pembersihan symbol tertentu, seperti angka, symbol, url, dan sebagainya, (5) Pengambilan kata sifat dari database kata KBBI, (6) Penghitungan jumlah kata yang bersifat negatif, positif, dan netral sesuai dengan Kamus KBBI, (7) Penghilangan kata selain kata sifat.

Data presentation

Tahapan terakhir adalah melakukan proses presentasi data yang telah diolah sebelumnya. Dimana data akan dipresentasikan dalam bentuk tabel sentimen, dan visualisasi jaringan percakapan, serta identifikasi aktor terkait pada Twitter dengan hashtag #PSBBJakarta melalui *software open source* untuk melakukan proses visualisasi data, *Gephi*. Dimana output dari *Gephi* adalah pola jaringan percakapan pada analisis data Twitter dengan hashtag #PSBBJakarta (Gambar 2).

Data yang telah selesai diolah kemudian akan dianalisis menggunakan teori Masyarakat Resiko dari Ulrich Bench, dan Panoptisme yang dikemukakan oleh Foucault.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pada penelitian ini akan dimulai dengan proses penguraian hasil temuan terhadap data twitter dengan metode *Social Network Analysis (SNA)*, yang dilanjutkan dengan analisis sentiment. Hasil sentiment kemudian diabstraksikan menggunakan teori masyarakat resiko dari Ulrich Beck dan Panoptisme yang dikemukakan oleh Foucault. Kedua teori tersebut dianggap relevan dan digunakan secara proporsional, konsep masyarakat resiko digunakan untuk mendalami respon masyarakat melalui twitter dan panoptisme untuk menjelaskan PSBB sebagai mekanisme pengawasan ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Temuan Penelitian

Pada bagian ini, hasil temuan dari analisis SNA akan diuraikan sesuai dengan Sentiment Analysis untuk memahami respon masyarakat terhadap pelaksanaan PSBB Jakarta Tahap II, yang dilaksanakan mulai tanggal 14 September 2020 yang lalu. Dimana penelitian ini menggunakan 10.000 data tweets yang diambil mulai tanggal 20 September hingga 29 September 2020.

Namun, setelah dilakukan proses cleaning data, dengan memberisihkan tweets yang terduplikasi, tweets yang diposting oleh bot/robot otomatis, serta tweets yang tidak memiliki konten/ memiliki karakter yang tidak dapat dibaca. Kemudian, setelah dilakukan *data processing*, dilakukan proses sentiment analisis tahap pertama dengan membaca emoticon yang terdapat pada tweets yang ada pada dataset tersebut. Penggabungan analisis sentimen dengan melakukan pencocokan emotions dan bank kata melalui *syntax support machine vectors* pada *RStudio* dapat meningkatkan akurasi hasil analisis respon masyarakat sebesar 69,74 persen (Alita, 2018). Dimana melalui analisis emoticons, maka didapatkan hasil sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1. Perbandingan Emoticons yang digunakan oleh Pengguna Twitter dengan hashtag #PSBB Jakarta

Jumlah Users	Emoticons
3	anger
56	anticipation
0	disgust
7	fear
8	joy
6	sadness
3	surprise
57	trust
18	negative
70	positive

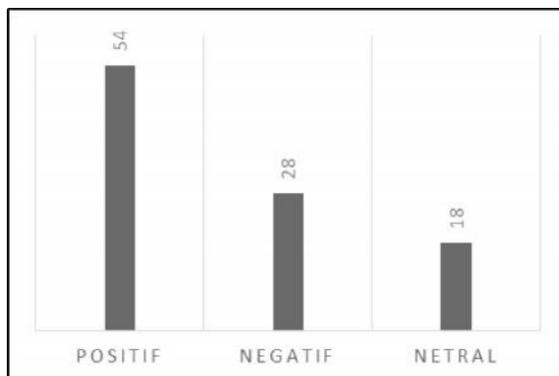
Hasil pemrosesan data menunjukkan bahwa Sebagian besar pengguna sosial media Twitter, dengan hashtag #PSBBJakarta, yang diambil pada tanggal 20 hingga 29 September 2020 menunjukkan temuan sebagai berikut : bahwa sebanyak 70 pengguna berpandangan Positif terhadap kebijakan tersebut, dimana mereka percaya dengan PSBB Jakarta Tahap II angka

pertambahan kasus COVID-19 di Jakarta dapat dikendalikan.

Kemudian, hasil kedua adalah sebanyak 57 pengguna menyatakan bahwa mereka percaya terhadap kebijakan PSBB Jakarta Tahap II sebagai salah satu cara yang efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, diikuti oleh 56 pengguna yang bersikap antisipatif terhadap dampak dari PSBB Jakarta Tahap II baik secara ekonomi, sosial maupun dampak lain yang mungkin terjadi, lalu diikuti dengan 8 pengguna yang menyatakan bahwa PSBB Jakarta menyenangkan, dikarenakan mereka dapat tinggal di rumah dan memiliki lebih banyak waktu dengan keluarga.

Dimana hal yang cukup menarik dalam temuan ini adalah hanya 7 pengguna yang menyatakan ketakutan akan dampak yang ditimbulkan dari PSBB DKI Jakarta, lalu 6 pengguna yang merasa sedih karena penerapan PSBB DKI Jakarta, diikuti dengan 3 pengguna yang merasa marah sekaligus kaget dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta tersebut.

Hasil temuan dilanjutkan dengan mendeskripsikan hasil dari analisis sentiment berupa emoticons, dengan menggunakan kamus KBBI yang berisikan kata yang bersifat positif, negatif dan netral. Dimana database kata positif terdiri atas 1182 bank kata, negatif terdiri atas 2042 bank kata, dan kata diluar tersebut dianggap netral. Hasil temuan respon warga DKI Jakarta terhadap PSBB Jakarta Tahap II adalah sebagai berikut (Grafik 1):



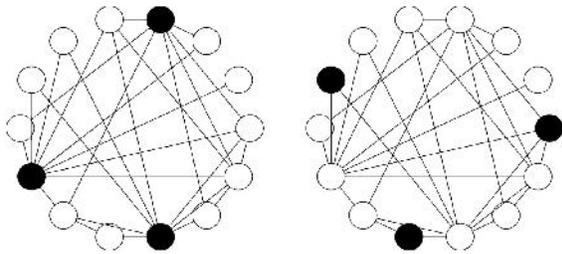
Grafik 1. Hasil Analisis Sentiment pada Hashtag #PSBBJakarta (Dalam Persen (%))

Hasil analisis sentiment melalui metode text processing menunjukkan hasil yang sama dengan

analisis emoticons yang sebelumnya telah dilakukan. Dimana hasil *text processing* menunjukkan bahwa 54 persen masyarakat pengguna twitter, yang memposting dengan hashtag #PSBBJakarta memiliki tanggapan yang positif terhadap kebijakan PSBB Jakarta Tahap II ini. Namun, sedikit berbeda dari hasil analisis emoticons, hasil yang ditunjukkan melalui text analysis menunjukkan bahwa 28 persen pengguna menyatakan bahwa kebijakan tersebut dianggap negatif, sedangkan sisanya bersifat netral. Teridentifikasi bahwa sebanyak 28 persen dari pengguna Twitter dengan hashtag #PSBBJakarta adalah media, dan akun pemerintahan yang bersifat menyebarkan informasi tanpa merespon terhadap kebijakan PSBB DKI Jakarta tersebut.

Setelah dilakukan proses analisis setimen, maka Analisa data dilakukan melalui proses identifikasi jaringan percakapan. Identifikasi dilakukan dengan memperhitungkan 3 hal pokok, yang akan membentuk jaringan percakapan pada twitter. Pertama, perhitungan tersebut dilakukan melalui identifikasi *Degree Centrality*, yang merupakan sentralitas suatu node (pengguna/users) dalam sebuah jaringan percakapan, yang diukur dengan menggunakan jumlah garis penghubung (edge) terhubung dengan beberapa node (pengguna/users). Perhitungan terhadap jumlah edge dari sebuah node (pengguna/users) dapat mengindikasikan kekuatan pengaruh yang dimiliki oleh seorang pengguna atau users dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik.

Kedua, perhitungan pada *Closeness Centrality* merupakan sentralitas sebuah node (pengguna/users) yang diidentifikasi berdasarkan jarak terdekat antar node (pengguna/users), dimana *closeness centrality* dapat digunakan untuk mengetahui kecepatan sebaran informasi yang terjadi disebuah jaringan percakapan di twitter. Ketiga, perhitungan terhadap *Betweenness Centrality* yang menunjukkan sentralitas dari sebuah node (pengguna/users) dengan memperhitungkan jumlah jalur komunikasi antar node terdekat yang melewatinya. *Betweenness Centrality* berperan cukup pening untuk mengetahui arus informasi yang tersebar dari satu node ke node lainnya. Dimana persebaran dari informasi pada sebuah jaringan percakapan dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 1):



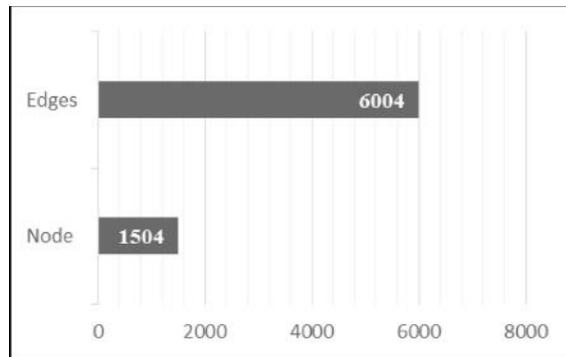
Sumber: Lerman, et all., 2016

Gambar 1. Identifikasi Node yang bertindak sebagai penyebar informasi (hitam = node penyebar informasi, putih = penerima informasi)

Dimana berdasarkan analisa data percakapan twitter dengan hashtag #PSBBJakarta, jaringan percakapan dapat diuraikan sebagai berikut (Gambar 2):

Melalui identifikasi pola interaksi pada jaringan percakapan yang terjadi pada hashtag Twitter #PSBBJakarta, maka dapat didapatkan beberapa temuan sebagai berikut ini (Grafik 3):

Analisa kemudian dilanjutkan dengan menguraikan data pokok terkait dengan percakapan yang terjadi pada hashtag #PSBBJakarta,



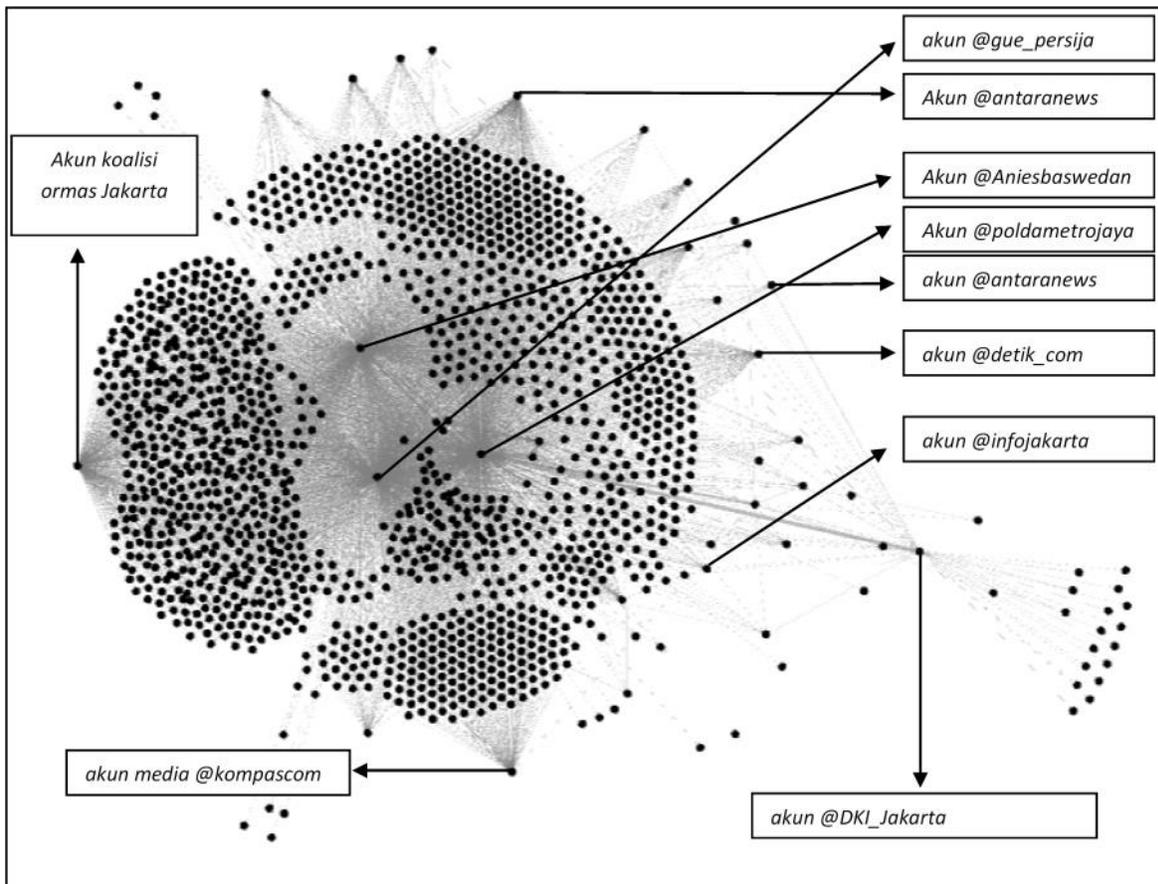
Grafik 2. Jumlah Nodes (Pengguna Aktif) dan Edges (Percakapan) pada Hashtag #PSBBJakarta

dengan menggunakan analisis visualiasasi data dengan *Gephi*. Didapatkan data sebagai berikut (Tabel 2):

Tabel. 2. Uraian Indikator Percakapan

Indikator	Nilai
Average Degree	3,992
Weighted Degree	5,689
Graph Density	0,003

Berdasarkan data yang telah disebutkan diatas, setelah dilakukan proses pemetaan



Gambar 2. Pola Jaringan Percakapan Antar Pengguna Twitter dengan Hashtag #PSBB Jakarta

jaringan percakapan oleh pengguna yang menggunakan hashtag #PSBBJakarta, dapat teridentifikasi sejumlah node (pengguna/user) yang paling aktif dalam membuat, dan menyebarkan tweet, serta mempengaruhi opini masyarakat (Tabel 3):

Tabel 3. Pengguna Paling aktif pada penggunaan hashtag #PSBBJakarta

Nama Akun	Profil Akun	Impresi
@detikcom	Media	16.700.000
@DKIJakarta	Pemerintah	3.880.000
@Radioelsinta	Media	3.640.000
@Aniesbaswedan	Media	2.459.000
@Guepersija	Komunitas	2.330.000

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat terlihat bahwa akun media dan pemerintah mendominasi pembentukan opini yang muncul pada saat implementasi kebijakan PSBB Jakarta Tahap II. Akun-akun diatas menyebarkan pesan yang memiliki maksud positif, dan mengajak masyarakat untuk ikut mendukung kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam mensukseskan PSBB Jakarta Tahap II. Dimana tweets yang paling sering dipublikasikan oleh akun-akun tersebut adalah sebagai berikut (Tabel 4):

Tabel 4. Tweet yang paling sering diretweet pada hashtag #PSBBJakarta per 29 September 2020 Pukul 16.54 WIB

Teks	Jumlah Retweet
<i>Peningkatan kasus aktif di Jakarta melambat dari 49% menjadi 12% sejak Gubernur Anies Baswedan mengambil keputusan menarik rem darurat dan kembali memberlakukan PSBB ketat sejak 14 September.</i> https://t.co/fLU7UZobeQ #dirumahaja #pakaimasker #jagajarak #psbbjakarta #jagajakarta 28-Sep-2020 20:35:03 UTC	737
[TERBARU] <i>Penanganan #COVID19 di Jakarta. (1/2) Update data tes dan kasus PCR DKI Jakarta 28 Sep 20. Strategi tes, lacak dan isolasi terus digencarkan utk temukan sebanyaknnya kasus positif sehingga dpt diisolasi, disembuhkan dan tdk menularkan virus.</i> #JagaJakarta #PSBBJakarta	54

<i>Malem - malem gini ngelamunin apa ya selain ngelamunin PSBB yang diperpanjang sampai 11 Oktober, inget ya sobat mimin harus tertib patuh sama PSBB agar covid cepat minggat. PSBB = Pernah Sayang Belum Berjodoh~ eaaa</i> #LawanCovid19 #TTVTertibPSBB #PSBBJakarta #T3 29-Sep-2020 12:51:11 UTC	53
---	----

Sesuai dengan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta melalui akun afiliasinya, baik akun resmi dan akun pribadi tokoh penting lainnya, dibantu dengan peran besar media, mampu merubah perspektif masyarakat dalam merespon penerapan PSBB Jakarta Tahap II. Dimana akibat peran beberapa pengguna twitter yang menjadi *influencer*/penyebarnya, maka masyarakat pengguna hashtag #PSBBJakarta cenderung sepaham untuk menganggap bahwa kebijakan tersebut akan berdampak positif dalam mengurangi dampak penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta.

Hal tersebut terbukti bahwa 54 persen pengguna twitter pada hashtag #PSBBJakarta memiliki tanggapan yang positif, dimana mereka menganggap kebijakan PSBB Jakarta Tahap II sudah tepat untuk dilaksanakan, hanya 46 persen dari masyarakat DKI Jakarta pengguna hashtag #PSBBJakarta yang berpandangan negatif.

Diskusi

Teori Masyarakat Resiko, yang dikemukakan oleh Beck menyatakan bahwa resiko yang ada pada masyarakat *post-modern* saat ini bersifat induktif, atau dapat diproduksi atau difabrikasi. Berbeda dengan resiko pada masyarakat modern awal, yang menganggap resiko sepenuhnya berada di luar kendali para aktor sosial. Masyarakat modern awal dicirikan dengan interkasi yang bersifat *nation-state*, dimana masyarakat terpecah menjadi negara-negara dengan budaya yang berbeda, dengan cara berinterkasi yang berbasiskan *programmatic individualism*, yang membuat masyarakat hanya akan berinteraksi dengan orang-orang yang

berasal dari strata sosial yang sama, yang ditentukan oleh partisipasi masyarakat terhadap kegiatan ekonomi (*Work Societies*) (Beck, et al., 2003).

Resiko pada periode modern awal dapat diumpamakan seperti penyakit akan menyebar, cuaca buruk akan merusak panen, kebakaran hutan akan menghancurkan habitat hewan liar.

Kemudian, muncul masyarakat modern periode kedua. Perkembangan zaman, menyebabkan semua nilai yang ada pada era masyarakat modern pertama berubah. Dimana perdagangan antar negara, penemuan internet, serta migrasi yang semakin intens membuat interaksi masyarakat tidak lagi menjadi berbasis *nation-state*. Globalisasi masif membuat masyarakat menjadi lebih terintegrasi, serta hilangnya Batasan-batasan kelas maupun strata sosial yang selama ini menjadi *barrier* dalam berinteraksi.

Sebaliknya, dalam era masyarakat modern kedua, yang dianggap sebagai masyarakat yang tinggi akan bahaya risiko seperti ancaman insiden bencana reaktor nuklir, dimana hal tersebut jelas merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia.

Namun, globalisasi yang masif membawa masyarakat kepada sebuah kondisi, dimana setiap individu bukan merupakan bagian dari sebuah komunitas masyarakat, dan harus bertanggungjawab kepada risiko yang akan dihadapinya sendiri (*The Quasi Subject*). Dimana masyarakat yang demikian, dapat dianggap sebagai subjek dari *post-modernism society* (Beck, et al., 2003). Pada masyarakat post-modern, rasionalitas individu menjadi sangat dominan dan membelenggu masyarakat untuk terhegemoni, sendiri sehingga membuat individu tidak sadar bahwa kondisinya sedang teralienasi. Maka dari itulah, masyarakat post-modern yang saat ini tengah menghadapi pandemik COVID-19, menjadi merasa terasing, bukan merasa menjadi anggota dari sebuah komunitas sosial, dan mudah percaya terhadap sesuatu yang benar menurut rasionalitasnya (Leiss, W., & Wynne, B., 2017).

Merespon penjelasan di atas, tidak semua risiko modern muncul dari campur tangan manusia di alam. Meskipun kekhawatiran tentang risiko medis dan lingkungan telah meningkat

secara mencolok sejak pertengahan 1970-an, kekhawatiran tentang kejahatan, imigrasi, keamanan internet, pasar keuangan, dan dislokasi sosial global juga telah menjadi ciri dunia jaringan dan industri. Dengan demikian, kecemasan risiko dapat ditorehkan tidak hanya pada alam dan tubuh manusia, tetapi juga pada pemahaman diri masyarakat modern.

PSBB Jakarta sebagai salah satu bentuk risiko yang dihadapi oleh masyarakat modern telah menunjukkan hal tersebut. Pandemi COVID-19 memang sepenuhnya diakibatkan oleh faktor alam atau eksternal, namun aktivitas manusia lah yang menyebabkan risiko yang dianggap berasal dari sumber eksternal (alam), menjadi lebih ganas dan mengancam masyarakat, hal ini dibuktikan melalui tidak patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan. Ulasan Beck yang cukup menarik adalah, pada masyarakat post-modern, risiko dapat difabrikasi, atau diproduksi dan kemudian menjadi risiko yang bersifat kolektif. Dengan catatan risiko tersebut dapat diterima secara rasional oleh masyarakat post-modern, yang bersifat *Quasi Subject*, atau dapat dianggap benar berdasarkan rasionalitas individu.

Hal ini disebabkan karena peran risiko dan perilaku masyarakat terhadap risiko sangat berbeda secara sosial dibandingkan apa yang terjadi di masa lalu. Dimana masyarakat modern yang bergantung terhadap gadget, atau sarana digital membuatnya semakin Individualis dan membentuk struktur sosial yang baru, pada masyarakat post-modern, dimana orang-orang menggunakan solusi yang bersifat biografis untuk mengatasi kontradiksi sistemik (Sutopo, O.R., Meiji, N, H, P., 2012). Dimana solusi biografis ini dapat diterima sebagai solusi bersama, dikarenakan hal tersebut sesuai dengan pemahaman rasional dari masyarakat.

Penemuan internet telah mengubah bagaimana sebuah risiko disebarkan, dan dipahami oleh masyarakat. Dimana komodifikasi dari risiko COVID-19, yang terus disebarluaskan melalui media-media mainstream, serta tingginya *positivity rate* di DKI Jakarta yang mencapai 14,1 persen, yang dipublikasikan dengan tingkat infeksi COVID-19 yang menunjukkan angka

hingga 1000 infeksi perhari membuat masyarakat memiliki kesadaran kolektif terhadap resiko yang semakin tinggi.

Kesadaran kolektif yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sosial media, yang kemudian didukung oleh media telah berhasil merubah stigma masyarakat akan sebuah resiko. Dimana proses fabrikasi resiko seperti yang telah disebutkan diatas memiliki tujuan yang positif, yaitu mengurangi paparan COVID-19 khususnya terhadap warga Jakarta. Analisis data menunjukkan bahwa Media dan Pemerintah bersinergi dalam membangun kesadaran masyarakat akan resiko ini, tentunya dengan melakukan fabrikasi resiko.

Terlihat bahwa tweet yang paling sering dipublikasi adalah tweet yang berfokus pada resiko dari infeksi COVID-19. Fabrikasi resiko ini berhasil membuat 54 persen masyarakat yang ada pada *digital public sphere*, merasa bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta Tahap II memang dibutuhkan sebagai jalan keluar dalam menghadapi Pandemi COVID-19 yang distigmatisasi sebagai resiko bersama. Dimana semakin tinggi resiko dipublikasikan, maka masyarakat Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai *conservative society* akan dapat semakin mudah untuk dikuasai (Wilson, 2009). PSBB sebagai salah satu cara mengimplementasikan manajemen risiko dipraktikkan untuk mengurangi kemungkinan risiko dan kesulitan yang diketahui.

PSBB Jakarta Tahap II yang saat ini mengedepankan faktor penegakan hukum juga dapat menggambarkan akan apa yang disebut dengan panoptisme. Pelaksanaan disiplin dengan mengedepankan penegakan hukum, yang dilegalkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, dianggap amat berhubungan dengan kuasa yang mengontrol setiap aspek kehidupan masyarakat, yang pada konteks saat ini adalah control terhadap perilaku masyarakat akan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Panoptisme sebagai mekanisme pengawasan masyarakat menurut Foucault dipraktikkan

dalam 2 (dua) cara. Pertama, melalui proses berupa observasi hirarkis melalui kewenangan yang diberikan kepada apparatus negara untuk mengawasi semua yang berada di bawahnya sesuai dengan satu kriteria yang disepakati (Sheridan, C., 2016), dalam hal ini kriteria tersebut adalah penurunan infeksi COVID-19 perhari di Jakarta agar dibawah 1000 infeksi positif perhari. Panopticon yang terungkap dalam menara sebagai pusat penjara adalah bentuk fisik dari instrumen ini. Dengan adanya panopticon ini kekuasaan sipir menjadi sangat besar sebab para tawanan berusaha menahan diri mereka sendiri. Mereka takut dipantau. Kehadiran struktur itu sendiri sudah merupakan satu mekanisme kekuasaan dan disiplin yang luar biasa.

Instrumen kedua yaitu melalui menormalkan penilaian moral, dengan memberikan hukuman yang bersifat diluar moral yang telah mengakar rumput, dengan menggunakan payung hukum berupa Peraturan Gubernur. Dan hal tersebut menjadi dasar untuk menghukum para pelanggar moral. Dimana yang terjadi saat ini adalah pelanggar PSBB Jakarta disamakan dengan seorang kriminal. Selain dipenjarakan, orang-orang yang menyimpang dipertontonkan. Maksudnya adalah menunjukkan kepada masyarakat betapa dekatnya manusia dengan binatang, dan manusia lain akan diperlakukan secara yang sama apabila mereka keluar dari batas-batas yang dipandang normatif oleh masyarakat (Sheridan, C., 2016).

SIMPULAN

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tahap II di Jakarta, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta yang berfokus pada penegakan hukum menuai banyak sekali pro kontra. Pemetaan dinamika respon masyarakat menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) dan analisis sentiment menunjukkan bahwa terdapat sebuah pola jaringan komunikasi yang saling bertautan, bertujuan mestigmatisasi masyarakat resiko akan COVID-19 dan menerapkan praktik panoptisme dengan penerapan saksi-saksi dan pengawasan yang ketat.

Resiko-resiko terkait COVID-19 telah difabrikasi sedemikian rupa, oleh Pemerintah dan Media mainstream menggunakan saluran komunikasi publik, yaitu sosial media agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko tertentu yang telah disepakati oleh penguasa. Akun-akun twitter resmi Pemerintah DKI Jakarta, Anies Baswedan Detik, Infojakarta, hingga Aliansi LSM se-Jakarta raya terus menghembuskan isu yang menggiring opini publik untuk berpikir sesuai keinginan penguasa, untuk memaklumi pelaksanaan PSBB Tahap II sebagai salah satu konsep pengelolaan resiko. Hasilnya, 54 persen masyarakat pengguna twitter memiliki setimen positif, dan hanya 28 persen yang memiliki sentiment negatif akan kebijakan ini, serta 18 persen menyatakan netral. Jika di total selisihnya sebenarnya tidak banyak antara yang positif dengan yang negatif maupun netral yakni sekitar 8 persen. Ini menunjukkan bahwa PSBB ke II memberikan harapan masyarakat untuk dapat menurunkan penyebaran covid19. Akan tetapi di sisi lain harapan tersebut dibayang-bayangi respon ketidaktersetujuan sebesar 28 persen dan 18 persen masyarakat cenderung netral dan belum mau menyatakan pendapatnya. Bisa jadi mereka yang berpendapat negative dan netral merujuk pengalaman mereka pada PSBB Jakarta sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A.R., & Murad, H.R. (2020). *The Impact of Social Media on Panic During the COVID-19 Pandemic in Iraqi Kurdistan: Online Questionnaire Study*. Jurnal Med Internet Res 2020, Volume. 22.
- Beck, U., Bonss, W., Lau, C. (2003). *The Theory of Reflexive Modernization Problematic, Hypotheses and Research Programme*. Jurnal Theory, Culture and Society, Volume: 20 issue: 2.
- Choung, M. (2016). *Sentiment analysis and topic extraction of the twitter network of #prayforparis*. Conference Paper in Proceedings of the Association for Information Science and Technology, January 2016.
- Correti, L., & Taki, Maha. (2013). *The Role of Social Media in The Arab Uprisings – Past and Present*. Jurnal Westmisnter Paper in Communication and Culture, Vol 2.
- Dewey, T., Kaden, J., Marks, M., Matshushima, S., & Zhu, B. (2012). *The Impact of Social Media on Social Unrest in the Arab Spring*. Final Report prepared for: Defense Intelligence Agency. United States of America (USA): Sandford University.
- Leiss, W., & Wynne, B. (2017). *Risk Society, Towards a New Modernity*. Jurnal Canadian Journal of Sociology.
- Lerman, K., Yan, X., & Wu, X.Z. (2016). *The “Majority Illusion” in Social Networks*. Jurnal PLOS ONE, Volume 1.
- Loeb, S., Dynarski, S., McFarland, D., Morris, P., Reardon, S., Reber, S. (2017). *Descriptive Analysis in Education: A Guide for Researcher*. United States of America (U.S.A): US Departement of Education.
- Putranti, M.D., & Winarko, E. (2014). *Analisis Sentimen Twitter untuk Teks Berbahasa Indonesia dengan Maximum Entropy dan Support Vector Machine*. Jurnal IJCCS, Vol.8, No.1, January 2014.
- Setatama, M.S., & Tricahyono, D. (2017). *Implementasi Social Network Analysis dalam Penyebaran Country Branding “Wonderful Indonesia”*. Jurnal Indonesian on Computing Vol. 2, Issue. 2.
- Schäfer, M. (2015). *Digital Public Sphere*. The International Encyclopaedia of Political Communication. London: Wiley Blackwell.
- Sheridan, C. (2016). *Foucault, Power and the Modern Panopticon*. United States of America (U.S.A): Trinity College.
- Sousa, H, Pinto, M, & Silva, E.C. (2013). *Digital public sphere: weaknesses and challenges*. Jurnal Comunicação e Sociedade, vol. 23.
- Sutopo, O.R., Meiji, N, H, P, (2012). *Transisi Pemuda dalam Masyarakat Risiko: antara Aspirasi, Hambatan dan Ketidakpastian*. Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 11 No. 3.
- Tabassum, S., & Fernandes, S. (2018). *Social network analysis: An overview*. Jurnal Wiley Interdisciplinary Reviews: April.
- Yusainy, C, Chawa, A.F, & Klolifah, S. (2017). *Social Data Analytics sebagai Metode Alternatif dalam Riset Psikologi*. Jurnal Buletin Psikologi, Vol. 25, No. 2.